

KOLABORASI PEMERINTAHAN DAN INOVASI KEBIJAKAN MELALUI KETERLIBATAN ANAK MUDA DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

Fa'aza Siva'a Fitri Raafiah¹, Gigih Satrio Pamungkas², Rindu Ayu Dyah Pasha S.³
Universitas Indonesia

Correspondence		
Email :		No. Telp:
Submitted 18 Mei 2024	Accepted 23 Mei 2024	Published 24 Mei 2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran strategis anak muda dalam mendorong inovasi kebijakan melalui partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif, pemerintah dapat memanfaatkan perspektif dan kreativitas anak muda untuk menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan berkelanjutan. Studi ini menganalisis praktik terbaik dalam melibatkan anak muda, khususnya melalui instrumen policy brief, serta mengidentifikasi tantangan dan faktor-faktor pendukung dalam kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan anak muda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak muda dapat meningkatkan kepercayaan pada pemerintah, memastikan kebijakan yang lebih responsif, dan mendorong inovasi dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks.

Kata kunci : kebijakan, keterlibatan anak muda

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang dinamis, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan kebijakan yang responsif dan inovatif. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk generasi muda yang mewakili masa depan suatu bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis anak muda dalam mendorong inovasi kebijakan melalui partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya dalam bentuk policy brief.

Pentingnya kolaborasi pemerintahan dan inovasi kebijakan tidak dapat dipungkiri. Menurut laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat meningkatkan kualitas dan relevansi kebijakan publik (OECD, 2017). Selanjutnya, studi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menekankan bahwa inovasi kebijakan merupakan kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks di Indonesia (Bappenas, 2019).

Peran anak muda dalam proses pembuatan kebijakan semakin diakui sebagai elemen penting dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti bahwa keterlibatan anak muda dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepercayaan pada pemerintah dan memastikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan generasi masa depan (PBB, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik terbaik dalam melibatkan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya melalui instrumen policy brief. Penelitian ini akan menjelajahi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan perspektif anak muda ke dalam kebijakan publik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan anak muda.

Tinjauan Pustaka

Konsep kolaborasi pemerintahan (collaborative governance)

Dalam artikel "Collaborative Governance in Theory and Practice" yang ditulis oleh Ansell & Gash (2008) untuk *Journal of Public Administration Research and Theory*, disajikan teori kolaboratif yang menyoroti peran penting kolaborasi dalam pengelolaan publik. Mereka mengeksplorasi konsep kolaboratif dengan mendefinisikan dan mengidentifikasi ciri-ciri kolaborasi dalam konteks pengelolaan publik, sambil menggambarkan peran berbagai aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, mereka menjelaskan teori-teori yang mendukung fenomena kolaboratif, termasuk bagaimana elemen-elemen seperti kepercayaan, kekuasaan, dan jaringan memengaruhi dinamika dan efektivitas kolaborasi dalam mencapai tujuan pengelolaan publik. Melalui analisis praktik kolaboratif, artikel ini juga menawarkan wawasan tentang strategi dan metode yang digunakan dalam pengelolaan publik, yang didukung oleh studi kasus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kolaborasi dalam praktek. Terakhir, Ansell & Gash (2008) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan peluang yang muncul dalam konteks kolaborasi, yang memberikan landasan untuk memahami kendala-kendala yang mungkin timbul serta potensi peningkatan efektivitas kolaboratif dalam mencapai tujuan pengelolaan publik.

Inovasi kebijakan dan peran pemangku kepentingan

Dalam artikel "The New Public Governance" yang ditulis oleh Osborne (2010) untuk *Public Management Review*, disajikan teori tentang konsep baru dalam pengelolaan publik yang dikenal sebagai "The New Public Governance." Osborne menyoroti pergeseran paradigma dalam pengelolaan publik dari model manajemen tradisional menuju bentuk yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan terdesentralisasi. Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan publik, seperti organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Osborne menguraikan bahwa New Public Governance bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih terbuka dan transparan antara pemerintah dan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan. Artikel ini juga menyoroti peran penting dari jaringan dan kemitraan antara sektor-sektor publik, swasta, dan nirlaba dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan publik. Dengan demikian, teori yang dikemukakan oleh Osborne menawarkan pandangan yang menyeluruh tentang evolusi konsep pengelolaan publik menuju model yang lebih inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat modern.

Partisipasi anak muda dalam tata kelola pemerintahan

Dalam bukunya yang berjudul "Participation and Governance," Jenkins (2009) mengembangkan teori tentang hubungan antara partisipasi dan tata kelola dalam konteks pengelolaan publik. Jenkins menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan sebagai elemen kunci dari tata kelola yang demokratis dan efektif. Teorinya menekankan bahwa partisipasi tidak hanya mengacu pada kehadiran fisik individu dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga pada inklusi aktif dalam pembentukan kebijakan, implementasi, dan evaluasi program-program publik. Jenkins mempertimbangkan berbagai bentuk partisipasi, mulai dari partisipasi langsung dalam forum-forum publik hingga partisipasi melalui representasi dan mekanisme perwakilan. Selain itu, Jenkins menyoroti bahwa partisipasi yang

efektif memerlukan adanya akses yang adil terhadap informasi, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan, serta lingkungan yang mendukung untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, teori yang dikemukakan oleh Jenkins memberikan dasar yang kuat untuk memahami hubungan antara partisipasi dan tata kelola dalam konteks pengelolaan publik, serta pentingnya partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan triangulasi data dari berbagai sumber dan metode, serta memberikan perspektif yang lebih holistik (Creswell & Plano Clark, 2018).

Metode Pengumpulan Data pada penelitian ini adalah Studi Pustaka dan Studi Kasus. Penelitian ini diawali dengan studi pustaka yang mendalam terhadap literatur terkait, seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan sumber daring yang relevan. Studi pustaka bertujuan untuk mempelajari konsep-konsep teoritis dan temuan empiris sebelumnya tentang kolaborasi pemerintahan, inovasi kebijakan, dan keterlibatan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan. Studi pustaka ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian. Kemudian, Studi Kasus akan dilakukan untuk mengeksplorasi inisiatif partisipasi anak muda yang berhasil dalam proses pembuatan kebijakan. Studi kasus akan memberikan insight mendalam tentang praktik terbaik, strategi, dan tantangan dalam melibatkan anak muda serta bagaimana keterlibatan tersebut mendorong kolaborasi pemerintahan dan inovasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis inisiatif kolaborasi pemerintahan yang melibatkan anak muda

Kolaborasi pemerintahan yang melibatkan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan merupakan sebuah inisiatif yang penting untuk memastikan partisipasi generasi muda dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Dalam analisis ini, akan dibahas beberapa aspek penting terkait inisiatif kolaborasi pemerintahan yang melibatkan anak muda.

1. Pentingnya Kolaborasi Pemerintahan dengan Anak Muda
 - Anak muda merupakan bagian penting dari populasi suatu negara dan memiliki pemahaman yang unik terhadap isu-isu yang mereka hadapi.
 - Kolaborasi dengan anak muda dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.
 - Melibatkan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan dapat meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi mereka dalam pembangunan negara.
2. Manfaat Kolaborasi Pemerintahan dengan Anak Muda
 - Meningkatkan kualitas kebijakan: Dengan melibatkan anak muda, pemerintah dapat mendapatkan perspektif baru dan ide-ide inovatif yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
 - Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi: Kolaborasi dengan anak muda dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

- Membangun pemimpin masa depan: Melalui kolaborasi ini, anak muda dapat belajar tentang proses pembuatan kebijakan dan menjadi pemimpin masa depan yang berkompeten dan berpengaruh.
3. Tantangan dalam Kolaborasi Pemerintahan dengan Anak Muda
- Kurangnya kesadaran dan pemahaman: Anak muda mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka.
 - Kurangnya akses dan representasi: Beberapa anak muda mungkin menghadapi hambatan akses dan kurangnya representasi dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga perlu ada upaya untuk memastikan inklusivitas dan keadilan dalam kolaborasi ini.
 - Tantangan komunikasi: Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan anak muda merupakan kunci keberhasilan kolaborasi ini, namun tantangan komunikasi dapat muncul akibat perbedaan bahasa, budaya, dan pemahaman.
4. Strategi untuk Meningkatkan Kolaborasi Pemerintahan dengan Anak Muda
- Membangun platform partisipasi: Pemerintah dapat membangun platform yang memungkinkan anak muda untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, seperti forum diskusi, konsultasi publik, atau kelompok kerja.
 - Meningkatkan akses dan representasi: Pemerintah perlu memastikan bahwa anak muda dari berbagai latar belakang dan daerah memiliki akses yang adil dan representasi yang memadai dalam proses pembuatan kebijakan.
 - Meningkatkan kesadaran dan pemahaman: Pemerintah dapat melakukan kampanye pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak muda tentang pentingnya partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan.

Dalam analisis ini, penting untuk memperhatikan bahwa setiap negara memiliki konteks dan tantangan yang berbeda dalam melibatkan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, strategi dan pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Identifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat kolaborasi

Faktor-faktor pendorong dan penghambat kolaborasi pemerintahan dan inovasi kebijakan melalui keterlibatan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan dapat bervariasi. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kolaborasi tersebut:

Faktor Pendorong:

- Potensi dan Kreativitas Anak Muda: Anak muda seringkali memiliki pandangan yang segar, ide-ide inovatif, dan kreativitas yang dapat membawa perubahan positif dalam pembuatan kebijakan. Potensi ini menjadi faktor pendorong bagi pemerintah untuk melibatkan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan.
- Perspektif yang Berbeda: Melibatkan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan dapat memberikan perspektif yang berbeda dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi generasi muda. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan relevan bagi anak muda.
- Teknologi dan Akses Informasi: Anak muda umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap teknologi dan informasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengakses data,

riset, dan informasi terkini yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kebijakan. Kolaborasi dengan anak muda dapat memanfaatkan teknologi dan akses informasi ini untuk menghasilkan kebijakan yang lebih berbasis bukti dan terinformasi.

Faktor Penghambat:

- Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Salah satu faktor penghambat kolaborasi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pihak pemerintah terkait pentingnya melibatkan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat upaya kolaborasi dan mengurangi partisipasi anak muda.
- Tidak Adanya Ruang Partisipasi: Jika tidak ada mekanisme atau forum yang memungkinkan anak muda untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, kolaborasi akan sulit terwujud. Tidak adanya ruang partisipasi yang jelas dapat menjadi penghambat bagi anak muda untuk berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan.
- Kurangnya Dukungan dan Sumber Daya: Kurangnya dukungan dan sumber daya dari pemerintah dalam melibatkan anak muda dapat menjadi penghambat kolaborasi. Dukungan yang kurang dapat menghambat partisipasi anak muda dan mengurangi efektivitas kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
- Perbedaan Generasi dan Budaya Organisasi: Perbedaan generasi dan budaya organisasi yang kaku dapat menjadi penghambat kolaborasi antara pemerintah dan anak muda. Perbedaan ini dapat menghambat komunikasi, pemahaman, dan kerjasama yang efektif antara kedua belah pihak.

Pemahaman terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat ini penting dalam merancang inisiatif kolaborasi pemerintahan yang melibatkan anak muda. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memanfaatkan pendorong-pendorongnya, kolaborasi dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif dalam pembuatan kebijakan

Inovasi kebijakan yang dihasilkan dari kolaborasi dengan anak muda

Salah satu inovasi kebijakan yang dapat dihasilkan dari kolaborasi dengan anak muda adalah inisiatif "Youth Policy Forum". Inisiatif ini melibatkan anak muda secara langsung dalam proses perumusan kebijakan, terutama dalam bidang pendidikan.

Melalui Youth Policy Forum, anak muda diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, ide, dan perspektif mereka dalam pengembangan program pendidikan formal dan non-formal. Hal ini memungkinkan kebijakan pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi generasi muda.

Salah satu contoh nyata dari inovasi kebijakan yang dihasilkan dari inisiatif ini adalah program pendidikan non-formal yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan masukan dan preferensi anak muda, sehingga lebih relevan dan menarik bagi mereka.

Peran Anak Muda dalam Kolaborasi Pemerintahan

- Kontribusi Anak Muda dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Dalam proses siklus kebijakan atau *policy cycle*, pembuatan kebijakan merupakan salah satu langkah krusial dalam terjadinya kebijakan, dimana dalam proses ini kebijakan diformulasikan dengan adanya masukan dari para pemangku kepentingan atau *stakeholders* mengenai hal apa yang harus dimasukkan dalam kebijakan tersebut. Dimana

agar dapat menghasilkan kebijakan yang merepresentasikan kepentingan para masyarakat, pemerintah seringkali melakukan kebijakan yang memperbolehkan untuk para pemangku kepentingan dapat mengajukan kepentingannya dalam proses pembuatan kebijakan. Dimana dalam kasus di Indonesia hal ini berupa suatu forum yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menyampaikan kepentingannya masing-masing yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang biasanya disebut dengan Musrenbang, dimana dihadiri oleh para pemangku kepentingan baik dari sektor swasta, pimpinan daerah sampai tokoh masyarakat. Walaupun begitu Musrenbang yang dilaksanakan di berbagai daerah seringkali tidak diikuti oleh para representasi dari anak muda, padahal dengan adanya partisipasi anak muda proses pembuatan kebijakan dapat menjadi lebih efektif (Lundy & O'Donnell, 2021). Selain dari itu, hanya terdapat beberapa daerah yang melakukan Musrenbang khusus anak muda yang dinamakan Musrenbang Pemuda. Hal tersebut juga tidak efektif untuk menyampaikan kepentingan para anak muda dengan masyarakat lainnya secara kolektif. Karena dengan adanya hal tersebut pemerintah akan lebih memungkinkan untuk mendengarkan pendapat tokoh masyarakat luas daripada pendapat anak muda, walaupun permasalahan yang dikedepankan oleh anak muda merupakan masalah yang akan muncul dampak penuhnya pada saat di masa depan, dimana permasalahan tersebut seperti mengenai perubahan iklim, pendidikan, dan hal yang lainnya.

a. Tantangan dan Peluang Keterlibatan Anak Muda

Indonesia mengalami tantangan dan peluang yang terjadi terhadap keterlibatan anak muda dalam pembuatan kebijakan, yang dimana tantangan terhadap terjadinya hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ruang partisipasi yang belum optimal, dalam hal ini keadaan di Indonesia mengenai ruang partisipasi yang diperuntukkan anak muda terhadap pembuatan kebijakan publik masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat diskriminasi terhadap usia dalam formulasi kebijakan publik di Indonesia. Dimana masih terdapat banyak pihak yang menilai bahwa anak muda tidak memiliki banyak pengalaman kehidupan, padahal terdapat banyak tokoh-tokoh muda yang seringkali menjadi agen perubahan seperti gerakan mahasiswa 1998, demonstrasi lingkungan yang diinisiasi oleh Greta Thunberg, dan gerakan-gerakan lainnya yang diinisiasi oleh anak muda (Gandhawangi et al., 2021)
2. Partisipasi yang bersifat tokenism, dalam teori tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein, tokenism merupakan suatu sifat dimana dilakukannya suatu partisipasi masyarakat tanpa adanya dampak yang terlihat dari partisipasi tersebut (Kay & Tisdall, 2021) Dimana seperti dengan forum yang dilakukan oleh pemerintah seperti Musrenbang sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Musrenbang seringkali hanya digunakan sebagai fasad untuk menunjukkan bahwa terdapat partisipasi masyarakat walaupun hal tersebut tidak benar, dan tidak menghasilkan kebijakan yang sesuai dari hasil diskusi yang dilakukan. Ditambah lagi dengan jumlah lulusan perguruan tinggi yang rendah membuat forum Musrenbang tidak efektif dalam menyampaikan aspirasi anak muda.

Walaupun demikian, terdapat peluang yang dapat digunakan oleh anak muda agar dapat melibatkan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan :

1. Mendapat keunggulan berupa teknologi, dengan semakin majunya perkembangan teknologi di dunia seperti AI, IOT, dan lainnya membuat anak muda mempunyai keunggulan terhadap kelompok usia lainnya mengenai teknologi, hal ini didukung dengan studi yang dilakukan oleh UNICEF dan Kominfo mengenai pemahaman anak muda terhadap internet, yang menemukan bahwa 98% dari anak muda memahami mengenai internet secara luas. Dimana dengan adanya keunggulan terhadap hal tersebut para anak muda bisa menjadi aktor terhadap pembuatan kebijakan yang mengelilingi permasalahan teknologi dengan keunggulan yang dimiliki oleh anak muda.
2. Mulai munculnya komitmen dari pemerintah, dalam beberapa tahun ini mulai munculnya sebuah komitmen yang disuarakan oleh pemerintah untuk melibatkan anak muda dalam pembuatan kebijakan. Dimana hal ini bisa terbukti dengan menunjuk beberapa anak muda dalam pemerintahan. Seperti yang terjadi dengan 7 orang staf khusus yang berada pada masa Presiden Jokowi yang dapat menyuarakan aspirasi daripada anak muda pada saat terjadinya pembuatan suatu kebijakan. Dengan adanya hal ini, anak muda menggunakan peluang ini agar dapat bisa lebih melibatkan dirinya dalam proses pembuatan kebijakan.

b. Strategi untuk Meningkatkan Partisipasi Anak Muda

Strategi untuk dapat meningkatkan partisipasi anak muda dalam proses pembuatan kebijakan, harus dilakukan strategi-strategi yang dapat bisa dilakukan agar hal tersebut bisa terjadi, hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemberdayaan terhadap organisasi anak muda, dalam hal ini pemerintah dapat melakukan pendukung terhadap organisasi anak muda yang ada, dalam rangka meningkatkan partisipasi.
2. Melakukan pemanfaatan terhadap teknologi, dengan menggunakan teknologi pemerintah dapat menarik ketertarikan anak muda dalam berpartisipasi proses pembuatan kebijakan melalui teknologi-teknologi, seperti internet.
3. Melakukan pelatihan atau pembelajaran, dengan adanya pelatihan atau pembelajaran mengenai proses pembuatan kebijakan baik melalui pembelajaran formal maupun pembelajaran informal, dengan begitu pemerintah dapat meningkatkan keterampilan pemuda dalam proses pembuatan kebijakan.

Rekomendasi dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan pembahasan kelompok kami tentang "Kolaborasi Pemerintahan dan Inovasi Kebijakan melalui Keterlibatan Anak Muda dalam Proses Pembuatan Kebijakan", berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan dengan substansi mencakup perbaikan kerangka kerja kolaborasi pemerintahan, mekanisme untuk meningkatkan keterlibatan anak muda, serta saran untuk mengembangkan inovasi kebijakan yang berkelanjutan:

- Perbaikan Kerangka Kerja Kolaborasi Pemerintahan:
 - Memperkuat landasan hukum dan kebijakan yang mendukung kolaborasi pemerintahan dan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk anak muda, dalam proses pembuatan kebijakan.

- Mengembangkan pedoman dan prosedur operasional standar yang jelas untuk memfasilitasi kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan anak muda.
- Membangun kapasitas pegawai pemerintah dalam hal keterampilan kolaborasi, komunikasi lintas sektoral, dan manajemen pemangku kepentingan.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung inisiatif kolaborasi pemerintahan dan keterlibatan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan.
- Mekanisme untuk Meningkatkan Keterlibatan Anak Muda:
 - Membentuk forum atau platform khusus yang memungkinkan anak muda untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pembuatan kebijakan, seperti konsultasi publik, kelompok kerja, atau komite penasihat anak muda.
 - Menyediakan pelatihan dan pembangunan kapasitas bagi anak muda untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pembuatan kebijakan dan keterampilan advokasi.
 - Mengembangkan mekanisme umpan balik dan akuntabilitas yang memastikan bahwa masukan dan rekomendasi anak muda benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
 - Melibatkan organisasi anak muda dan pemimpin anak muda sebagai mitra strategis dalam proses kolaborasi pemerintahan dan pembuatan kebijakan.
- Saran untuk Mengembangkan Inovasi Kebijakan yang Berkelanjutan:
 - Mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintahan dengan memberikan insentif dan penghargaan bagi inisiatif inovatif dalam pembuatan kebijakan.
 - Mempromosikan kolaborasi lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu untuk mendorong pertukaran ide dan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan kebijakan yang kompleks.
 - Memanfaatkan teknologi digital dan platform online untuk memfasilitasi partisipasi anak muda, crowdsourcing ide, dan eksperimentasi kebijakan.
 - Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak kebijakan dan mengidentifikasi peluang perbaikan melalui inovasi.
 - Mendorong kerja sama internasional dan berbagi praktik terbaik dalam inovasi kebijakan untuk mempercepat proses pembelajaran dan adaptasi kebijakan yang efektif.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, pemerintah dapat meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk anak muda, dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, keterlibatan anak muda yang bermakna dapat mendorong inovasi kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi kolaborasi pemerintahan dan inovasi kebijakan melalui keterlibatan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan melibatkan anak muda, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif, relevan, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan generasi masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi kasus. Studi pustaka

memberikan landasan teoritis, sementara studi kasus mengeksplorasi inisiatif partisipasi anak muda dalam pembuatan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan dapat meningkatkan kepercayaan publik, transparansi, dan relevansi kebijakan. Namun, terdapat tantangan seperti kurangnya kapasitas, peluang partisipasi, dan perbedaan generasi yang perlu diatasi.

Salah satu inovasi kebijakan yang dihasilkan dari kolaborasi dengan anak muda adalah inisiatif "Youth Policy Forum" yang melibatkan anak muda dalam perumusan kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda.

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kerangka kerja kolaborasi pemerintahan, mekanisme untuk meningkatkan keterlibatan anak muda, serta saran untuk mengembangkan inovasi kebijakan yang berkelanjutan, seperti mendorong budaya inovasi, kolaborasi lintas sektoral, dan memanfaatkan teknologi digital.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk anak muda, dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga inovasi kebijakan menjadi lebih responsif dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks.

REFERENSI

- Bappenas. (2019). Laporan Nasional: Inovasi Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Diakses dari: <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage Publications.
- Gandhawangi, S. (2021, Agustus). Ruang Partisipasi Pemuda dalam Kebijakan Publik Belum Optimal. Kompas.id. Retrieved May 12, 2024, from https://www.kompas.id/baca/metro/2021/08/20/ruang-partisipasi-pemuda-dalam-kebijakan-publik-belum-optimal?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall
- Kay, E., & Tisdall, M. (2021). Meaningful, Effective and Sustainable? Challenges for Children and Young People's Participation. *Young People's Participation*, 217–234. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447345411.003.0013>
- Kominfo. (n.d.). 98 Persen Anak dan Remaja Tahu Internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Retrieved May 12, 2024, from https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3836/98+Persen+Anak+dan+Remaja+Tahu+Internet/0/berita_satker
- Lundy, L., & O'Donnell, A. (2021). Partnering for Child Participation Reflections from a Policy-Maker and a Professor. *Child and Youth Participation in Policy, Practice and Research*, 15–29. <https://doi.org/10.4324/9781003099529-3>
- Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif . Diakses dari <http://salimafarma.blogspot.com/2011/05/metode-dan-teknik-pengumpulan-data.html>
- Metode Wawancara Mendalam (Indepth-Interview) dalam Penelitian Kualitatif. Diakses dari <http://www.menulisproposalenelitian.com/2011/04/wawancara-mendalam-indepth-interview.html>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
- OECD. (2017). *Laporan Kebijakan: Membangun Pemerintahan Kolaboratif untuk Kebijakan Publik yang Lebih Efektif*. Diakses dari: <https://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-339306da-en.htm>
- PBB. (2020). *Laporan Pemuda Dunia 2020: Partisipasi Pemuda dalam Pengambilan Keputusan*. Diakses dari: <https://www.un.org/development/desa/youth/world-youth-report/wyr2018.html>
- Satori, K. (2013). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Retrieved from <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=42664&pRegionCode=JIUNMAL&pClientId=111>
- TEKNIK WAWANCARA (In-depth Interview). Diakses dari <http://penelitianpasar.blogspot.com/2012/03/teknik-wawancara-dalam-pengumpulan-data.html>
- Volodin, N., Kallio, K.P., & Häkli, J. (2021). Youth Participation in Public Policy Processes: From Empty Rhetoric to Achieving Accountability through Youth-Friendly Mechanisms. *Sustainability*, 13(4), 2278. <https://doi.org/10.3390/su13042278>
- Wandasari, W. (2020, August 10). *Saatnya Pastikan "Partisipasi Kaum Muda" Bukan Hanya Jargon*. PUSKAPA. Retrieved May 12, 2024, from <https://puskapa.medium.com/saatnya-pastikan-partisipasi-kaum-muda-bukan-hanya-jargon-7c5b53b48f77>
- Yin, R. K. (2013). *Case Study Research Design and Methods* (4th ed. Vo). Sage Publication.